

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Revitalisasi Pertanian	9
2. Kebijakan Publik	11
3. Evaluasi Kebijakan	18
4. Negara Kesejahteraan	21
5. Indikator Kesejahteraan	24
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek/Objek Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengambilan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Prosedur Pengumpulan Data	36

H. Validitas Data	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Lokasi Penelitian Kecamatan Purwaharja	39
a. Letak Geografif Kecamatan Purwaharja	39
B. Karakteristik Informan	41
C. Gambaran Umum Pertanian Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Dari Rekapan 2015-2018 BPS	
Kota Banjar	41
a. Data Kecamatan Purwaharja 2015	41
b. Data Kecamatan Purwaharja 2016	44
c. Data Kecamatan Purwaharja 2017	46
d. Data Kecamatan Purwaharja 2018	48
D. Hasil Produksi Beras Dari Tahun 2015-2018 DISTAN	51
E. Kesejahteraan Petani Menurut RESTRA 2015-2018	51
F. Analisis Pendapatan Petani Beras Dari Tahun 2015-2018 Data DISTAN	53
G. Analisis Pendapatan Petani Beras Dari Tahun 2015-2018 Data BPS	54
H. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Pendapatan Gabah Petani Terbanyak dan Terendah Di Kecamatan Purwaharja Selama Kurun Waktu 2015-2018	57
I. Data Hasil Pertanian Kecamatan Purwaharja Tahun 2015-2018 BPS	59
J. Rincian Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Purwaharja	59
K. Penerapan Program Revitalisasi Pertanian Di Petani Kecamatan Purwaharja	60
L. Evaluasi Kebijakan Melalui Program Revitalisasi	

Pertanian Di Kecamatan Purwaharja	62
M. Analisis Program Revitalisasi Pertanian di Kecamatan	
Purwaharja	64
N. Indikator Kesejahteraan	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
Daftar Pustaka	81
Lampiran	84
Matriks Wawancara	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tahap Analisis Kebijakan	15
Tabel 1.2 Kerangka Analisis Kebijakan	15
Tabel 1.3 Evaluasi Kebijakan	20
Tabel 1.4 Prosedur Pengumpulan Data	36
Tabel 1.5 Data Informan	41
Tabel 1.6 Pendapatan Petani Kecamatan Purwaharja	51
Tabel 1.7 Luas Lahan Petanian Kecamatan Purwaharja	51
Tabel 1.8 Pendapatan Petani Kecamatan Purwaharja BPS	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Kebijakan Publik	14
Gambar 1.2 Kebijakan Sebagai Suatu Proses	19
Gambar 1.3 Kerangka Konseptual	30
Gambar 1.4 Jarak Desa Kecamatan Purwaharja	40
Gambar 1.5 Peta Kecamatan Purwaharja	40
Gambar 1.6 Luas Irigasi Persawahan 2015	43
Gambar 1.7 Luas Lahan Persawahan Padi 2015	43
Gambar 1.8 Luas Irigasi Persawahan 2016	45
Gambar 1.9 Luas Lahan Persawahan Padi 2016	45
Gambar 2.0 Luas Irigasi Persawahan 2017	48
Gambar 2.1 Luas Lahan Persawahan Padi 2017	48
Gambar 2.2 Luas Irigasi Persawahan 2018	50
Gambar 2.3 Luas Lahan Persawahan Padi 2018	50
Gambar 2.4 Hasil Pendapatan Petani Beras Kecamatan Purwaharja Tahun 2015-2018 DISTAN	53
Gambar 2.5 Hasil Pendapatan Petani Beras Kecamatan Purwaharja Tahun 2015-2018 BPS	55
Gambar 2.6 Statistik Pendapatan Petani	57

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hasil dari sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui program Revitalisasi Pertanian. Kebijakan tersebut dibuat berguna untuk mengelola SDA disetiap wilayah khususnya Kecamatan Purwaharja. Adapun teori yang digunakan dalam memperkuat penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan dan Negara Kesejahteraan. Evaluasi kebijakan tersebut dapat memberikan gambaran terhadap kebijakan pemerintah melalui program Revitalisasi Pertanian. Evaluasi kebijakan merupakan rangkaian akhir dari sebuah kebijakan publik, yang pada akhirnya memberikan *outcome* pada sebuah kebijakan. Hasil akhir dari penelitian untuk mengetahui berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan petani beras. Dalam penelitian ini adalah program Revitalisasi Pertanian dan petani beras. Peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan purpose sampling dengan dibantu pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumen.

Hasil penelitian ini untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat petani beras melalui program Revitalisasi dari program tersebut pemerintah memberikan subsidi benih padi maupun pupuk untuk membantu pengeluaran petani beras. Dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah memiliki lembaga untuk menyalurkan program tersebut, yaitu BPP. Peran BPP diatur dalam PERMENTAN Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian. Adapun pelayanan sosial yang pemerintah upaya untuk mengupayakan kesejahteraan petani yitu melalui program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi). Diatur Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/Sr.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. Maka jika dilihat dari tipologi Negara Kesejahteraan, termasuk kedalam Negara Kesejahteraan Sosial Menurut Norman Furniss dan Timothy Tilfson. Serta jika dilihat dari Indikator Kesejahteraan maka *social inclusion* merupakan sistem sosial yang ada dimasyarakat, dimana masyarakatnya memiliki status sama dalam masyarakatnya, tidak adanya di kriminasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Sehingga akhirnya masyarakat yang ikut serta kepada Kelompok Tani dengan yang tidak ikut serta dapat menjalin kehidupan sosial secara *tentram*.

Kata Kunci : Revitalisasi Pertanian, Evaluasi Kebijakan, Metode Kualitatif dan Negara Kesejahteraan

ABSTRACT

This study was designed to discuss the results of policies made by the government through the Agricultural Revitalization program. This policy was made useful to be managed by SDA in each special area of Purwaharja District. The theory used in this study is Evaluation of Welfare Policies and Countries. Evaluation of these policies can provide an assessment of government policies through the Agricultural Revitalization program. Policy evaluation is the final stage of public policy, which ultimately results in a policy. The final results of the study to study whether or not the policies made by the government are running to seek the welfare of rice farmers. In this study the Agricultural Revitalization program and rice farmers. This researcher uses descriptive research using qualitative methods. This study uses purposive sampling by collecting data through interviews, observations and documents.

The results of this study to see the level of rice farming communities through the Revitalization program from this program the government provides rice seed subsidies or fertilizers to help farmers farmers. In implementing the program the government has an institution to channel the program, namely the BPP. The role of BP Formation in PERMENTAN Number 47 / PERMENTAN / SM.010 / 9/2016 Agricultural Extension Program. Related to social services held by the government to seek the welfare of farmers through the AUTP (Rice Farm Business Insurance) program. Regulated by Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number: 15 / Kpts / Sr.230 / B / 05/2017 concerning Guidelines for Rice Farming Insurance Premiums. So if seen from the typology of the welfare state, including the State of Social Welfare, according to Norman Furniss and Timthy Tilfon. When viewed from the Indicator of Welfare, social inclusion is a social system in the community, where the community has the same status in the community, there is no discrimination between one community and another. So that finally the community can participate in the Farmers' Group with those who do not participate and can establish peaceful social life.

Keywords: Agricultural Revitalization, Policy Evaluation, Qualitative Methods and Welfare Countries